

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

Sejak bulan Februari 2003, masalah teknologi nuklir Iran menjadi salah satu topik hangat yang dibahas oleh media massa dunia. Seperti biasanya, para pejabat Amerika Serikat kembali mencoba menciptakan opini umum bahwa yang diupayakan Iran saat ini adalah proyek pembuatan senjata nuklir. Amerika Serikat yakin Iran menggunakan program nuklir sipil untuk menyelubungi usaha untuk melakukan usaha pengembangan senjata nuklir. Meski ada kecurigaan negara itu tengah berusaha membuat senjata nuklir, Iran menekankan bahwa program nuklirnya diperuntukkan semata-mata untuk menghasilkan tenaga listrik.

Alasan Iran untuk mengembangkan program senjata nuklir adalah untuk tujuan damai dan pemerikayaan uranium hanya digunakan sebagai sumber tenaga pembangkit listrik. Bagi Iran, nuklir adalah sumber energi yang besar dan langgeng. Untuk itu pemerintah Iran sejak beberapa dekade silam telah merencanakan pembangunan proyek nuklir non militer. Berkat kerja keras para ilmuwan Iran, negara ini berhasil memperoleh kemampuan untuk memanfaatkan teknologi produksi listrik dengan menggunakan tenaga nuklir. Sebagai negara anggota Traktat Non-Proliferasi Nuklir (NPT) Iran memiliki hak untuk memanfaatkan energi ini dalam bidang non militer dan Iran tidak akan pernah bersedia melepas hak ini. Untuk tambahan, NPT menizinkan Iran secara legal membangun beberapa fasilitas

memperkaya uranium, sejauh yang diharapkan untuk tujuan damai. Selain itu, NPT mengizinkan negara anggota menarik diri dari perjanjian, negara anggota diberi waktu 90 hari untuk memberitahukan kepada IAEA, jika mereka yakin bahwa syarat-syarat dari NPT dapat mengancam keamanan nasional mereka.

Perseteruan antara Iran dan Amerika sudah berjalan sejak lama. Revolusi Iran di tahun 1979 telah menyebabkan relasi kedua negara tidak serasi. Drama penyanderaan terhadap diplomat Amerika Serikat di Teheran pada tanggal 4 November 1979, yang di sandera selama 444 hari serta di iringi dengan aksi pembakaran bendera Amerika Serikat dan slogan-slogan berisi kutukan dan cacian yang diarahkan ke Washington telah membuat Iran dan Amerika Serikat saling bermusuhan.

Di bawah pemerintahan George W. Bush hubungan Amerika Serikat-Iran semakin memanas terutama pasca Tragedi WTC, 11 September 2001. Amerika Serikat tidak membuka hubungan diplomatik yang ada akan tetapi semakin meningkatkan tekanan-tekanannya terhadap Iran. Embargo Ekonomi tahun 1980 atas Iran yang disusul dengan dimasukkannya negara ini sebagai salah satu sarang teroris Al Qaeda, semakin melengkapi propaganda Amerika Serikat yang memasukkan Iran bersama Irak dan Korea Utara ke dalam Poros Setan (*axis of evil*). Ditambah lagi dengan adanya proyek kerjasama antara Iran dan Rusia yang berupaya mengembangkan uranium sebagai bahan pembuat senjata nuklir. Pemerintahan Amerika Serikat mengkhawatirkan apabila proyek tersebut akan dikembangkan untuk membuat program senjata nuklir yang berfungsi sebagai senjata per

Dunia Barat, terutama Amerika Serikat, ingin menggunakan berbagai cara untuk terus menekan Iran atas isu persenjataan nuklir. Meski hasil investigasi Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) tidak menemukan bukti konkret atas program persenjataan nuklir Iran, Amerika Serikat tetap menuduh negeri itu memiliki persenjataan nuklir. Pemerintah Amerika Serikat dan berbagai kelompok kepentingan disana kemudian melakukan tekanan diplomatik ke Iran dengan membawa masalah tersebut diatas ke Dewan Keamanan PBB. Amerika Serikat juga telah berhasil melakukan diplomasi ke IAEA sebagai sebuah lembaga yang berfungsi untuk mengawasi pembuatan program senjata nuklir. Iran kemudian terpaksa menandatangani amandemen *Non-Proliferasi Treaty* (NPT) agar IAEA dapat mengadakan inspeksi mendadak ke lokasi pembuatan senjata nuklir tersebut.

Tindakan pemerintah Amerika Serikat tersebut sangat dipengaruhi oleh perubahan yang terjadi dalam arah kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat. Pasca Tragedi WTC yang menyisakan dampak yang luar biasa pada rakyat maupun pemerintah Amerika Serikat, perlu disusun kembali sebuah strategi yang mampu menjamin keberlangsungan hidup bangsa yang lebih kokoh di hadapan masyarakat internasional. Amerika Serikat menganggap Iran sebagai negara Major Power baik di kawasan Teluk Parsi maupun Timur Tengah (pasca Perang Teluk II) dengan menempuh program modernisasi untuk mengembangkan kemampuan pertahanannya dan melihat Iran sebagai negara produsen minyak terbesar kedua di dunia setelah Arab Saudi. Dengan keyakinan Amerika Serikat bahwa Iran menggunakan program nuklir sipil untuk menyelubungi usaha untuk melakukan usaha per-

nuklir, maka pemerintah Amerika Serikat menggunakan strategi yang berupa *konfrontasi*. Dilihat dari kemampuan militer Iran, Iran belum mampu menandingi kekuatan militer Amerika Serikat dan sekutunya. Kerjasama Iran dengan Rusia dalam bidang meningkatkan teknologi militer adalah sebagai salah satu cara Iran menghambat sasaran Amerika Serikat setelah Irak.

Amerika Serikat melihat Iran sebagai ancaman bagi kepentingan nasionalnya, karena letak geografis, potensi alam dan manusia, serta agenda politiknya, juga penolakan Iran atas eksistensi Israel. Dengan melihat kemampuan Iran tersebut maka pemerintah Amerika Serikat mengambil suatu strategi *konfrontasi* untuk membendung langkah Iran dalam mengembangkan senjata nuklir yang dilancarkan melalui kebijakan ekonomi yang berupa *ancaman* pemotongan akses negara Iran terhadap bantuan Amerika Serikat serta *ancaman* pembekuan hubungan dagang dengan negara lain atau sering disebut sebagai *embargo ekonomi*. Selain itu, Amerika Serikat juga *meminta* kepada Rusia dan negara-negara UE (Uni Eropa) untuk memutuskan hubungan ekonomi dan melancarkan tekanan ekonomi (*embargo ekonomi*) terhadap Iran jika negara tersebut terus mengembangkan program nuklirnya.

Washington juga *mendesak* Moskow membatalkan kontrak pembelian reaktor nuklir ringan dengan Iran. Di bidang bisnis, sementara Washington *melobi* Jepang dan Jerman (2 mitra dagang Iran) untuk tidak memberi kredit dan membatasi kerjasama bisnis perusahaan Amerika Serikat justru memanfaatkan kontrak dan

memasarkan minyak serta komoditas Iran sampai senilai 4 milyar dollar AS setahun (25 % dari total pendapatan luar negeri Iran) ke pasar Internasional.

Dengan dikeluarkannya ancaman *embargo ekonomi* Amerika Serikat untuk Iran, diharapkan langkah ini bisa memacu dan menumbuhkan kepercayaan dari dunia internasional, terutama sekutu-sekutunya terhadap Amerika Serikat. Karena dengan ancaman pemberian sanksi ekonomi diharapkan dapat mengakhiri krisis nuklir Iran. Dengan kepercayaan internasional kepada Amerika Serikat yang dianggap dapat menyelesaikan masalah nuklir Iran, maka hal ini juga dapat membuat Amerika Serikat dapat mempertahankan statusnya sebagai negara *super power*. Amerika Serikat selalu merasa terancam bila ada negara lain yang mencoba mengembangkan teknologi senjata penghancur massal tersebut, terutama senjata nuklir.

Setidaknya ada tiga hal yang dapat dijadikan asumsi dari rencana penjatuhan sanksi atau ancaman *embargo ekonomi* Amerika Serikat terhadap Iran tersebut yaitu *pertama*, ancaman sanksi tersebut diharapkan akan dapat mengisolasi Iran, *kedua*, tidak akan merugikan bisnis Amerika Serikat, dan *ketiga*, ancaman sanksi tersebut akan menghambat pertumbuhan industri minyak Iran secara khusus dan akan menghambat pembangunan Iran secara umum.

Iran menjadi negara yang potensial untuk menjadi kekuatan regional baru setelah strategi politik dan militernya dengan pengaruh perubahan konstelasi dunia pasca perang dingin sehingga menjadikan kemerosotan pengaruh adidaya Amerika Serikat. Iran yang diyakini sedang giat mengembangkan senjata nuklir semakin

Prestasi industri militer Iran antara lain kemampuan Iran membuat rudal balistik jarak jauh dari darat ke darat Shihab I, Shihab II, dan Shihab III diklaim menjangkau jarak antara 2.000-3.000 km. Iran juga menandatangani kontrak pembelian rudal anti udara SS 300 dari Rusia yang setara dengan kemampuan Patriot buatan Amerika Serikat dan Tank T72.

Presiden George W. Bush akhirnya mengumumkan tentang Strategi Keamanan Nasional Amerika Serikat (*National Security Strategy-2002/NSS-2002*) yang didasari dikeluarkannya doktrin *pre-emptive strike* (serangan dini) dan doktrin *defensive intervention* (intervensi defensive). Doktrin ini diterapkan dan mendapat pembenaran sejak peristiwa 11 September 2001. Presiden George W. Bush secara tegas mengatakan bahwa Amerika Serikat harus mendahului daripada didahului. Amerika Serikat harus menyerang bukan hanya negara-negara yang menentang tetapi juga wilayah yang dianggap berpotensi sebagai teroris.

Strategi Keamanan Nasional Amerika Serikat yang berupa *ancaman Pre-emptive Strike* (Serangan Dini) rencananya akan digunakan Amerika Serikat untuk menyerang Iran, dengan tujuan agar Iran bersedia menghentikan program nuklirnya. Untuk melaksanakan rencana itu, Presiden Amerika Serikat George W. Bush diam-diam telah mengirimkan mata-mata ke berbagai instalasi persenjataan di Iran. Bahkan, mata-mata tersebut beroperasi di Iran sejak musim panas lalu. Misinya, mengincar fasilitas senjata Iran sebelum melakukan serangan udara ke tempat tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh Seymour Hersh, wartawan majalah *The New Yorker*. Dia mengaku berulang-ulang diberi tahu sumber militer di

Iran adalah target strategis Amerika Serikat berikutnya setelah Iran. Karena itu, dia mengungkapkan pula bahwa, Presiden Bush mengizinkan misi mata-mata di Iran yang dilakukan sejak pertengahan 2004. Hersh menjelaskan, misi itu memang bertugas mengumpulkan data intelijen mengenai lokasi rudal, senjata kimia, dan nuklir Negeri Mullah itu, baik yang sudah dinyatakan kepada umum maupun yang tidak. *"Tujuannya untuk mengidentifikasi dan mengisolasi tiga puluhan target seperti itu atau mungkin lebih yang dapat dihancurkan dengan serangan tepat sasaran dan serangan komando dalam waktu singkat,"* tulis Hersh.

Kebijakan ancaman *Pre-emptive Strike* yang akan dilakukan Amerika Serikat berdasarkan tiga asas atau dasar, yaitu;

1. Kepentingan nasional Amerika Serikat merupakan satu-satunya tujuan dan kriteria di dalam maupun di lapangan operasional.
2. Segala kebijakan dan aksi di lapangan adalah bertujuan memperkuat dan melindungi kedudukan Amerika Serikat sebagai superpower tunggal, sehingga dalam abad 21 Amerika Serikat akan mendapatkan atau akan meneruskan hegemoninya di dunia.
3. Untuk menjamin kepentingan Amerika Serikat sebagai superpower tunggal maka dilakukan kebijakan *Pre-emptive Strike* untuk pendaulatan dari integritas politik dan teritorial negara lainpun boleh dilakukan.

Dunia tinggal menanti apakala tim IAEA seperti yang dikatakan oleh Uni

resolusi Dewan Keamanan PBB untuk menindak Iran dengan embargo dan sanksinya. Apalagi bila Iran telah dituduh pula sebagai terlibat jaringan teroris global yang harus ditumpas, dan sahlah jika Amerika Serikat memimpin pasukan internasional untuk menggempur Iran.